# Dua Tahun Prabowo–Gibran: Ke Mana Arah Indonesia?

Pokok-pokok pikiran dan catatan atas Laporan Sintesis TII

**Yanuar Nugroho**
Sekretaris Jenderal Konferensi Republik – Perhimpunan Indonesia Merdeka
Pendiri dan Penasihat NALAR Institute
Jakarta, 22 Oktober 2026

# Tesis: Programisasi Pembangunan

***"Negara yang kuat bukan negara yang besar, tetapi negara yang mampu mendengar dan mau mengoreksi diri."***

**Arah yang jelas.** Negara makin besar dan makin terpusat. Yang belum jelas: apakah negara yang besar ini juga mampu dan mau dikoreksi.

**Programisasi pembangunan.** Pembangunan dipadatkan menjadi beberapa program unggulan (MBG, Kopdes Merah Putih, swasembada, hilirisasi) yang dirancang dari pusat.

**Empat mata rantai yang saling mengunci:** (1) keputusan terpusat, (2) fiskal terpusat melalui pemangkasan TKD, (3) keberhasilan diukur dengan angka jangkauan, (4) ruang kritik dan koreksi menyempit.

**Laporan TII memotret keempatnya,** tetapi di bab yang berbeda-beda dan belum ditautkan.

**Sikap dasar:** niatnya sah dan sebagian tujuannya benar (gizi, pangan, energi).
Persoalannya bukan niat, tapi tata kelola dan *delivery*.

# Q1. Arah Pembangunan: Apa yang Berubah?

*"Era Jokowi membangun beton, era Prabowo membagi piring. Arahnya ke program sosial, tetapi caranya makin sentralistik."*

- **Pergeseran prioritas (perlu diakui).** Dari infrastruktur fisik ke program sosial dan modal manusia: MBG, cek kesehatan gratis, Sekolah Rakyat. Koreksi yang masuk akal atas pembangunan yang beton-sentris.
- **Resentralisasi: perubahan terbesar.** Fiskal: TKD turun dari Rp919,9 T (APBN 2025) ke Rp693 T (APBN 2026), sekitar seperempat hilang; 15 kepala daerah protes. Administratif: MBG lewat BGN/SPPG melompati pemda; Kopdes top-down. Koersif: revisi UU TNI.
- **Komando menggeser perencanaan.** Program lahir dari Perpres/Inpres dan janji politik, lalu dicarikan anggarannya lewat "efisiensi" (Inpres 1/2025). RPJMN menjadi pelengkap, bukan kompas.
- **Kelembagaan membengkak.** Kementerian dipecah, badan baru (BGN, Danantara, Bakom). Tahun pertama habis untuk menata nomenklatur.
- **Makro terjaga, tapi itu syarat minimum.** Pertumbuhan Q2 2026: 5,29% (BPS); defisit di bawah 3%. Stabilitas bukan bukti kualitas kebijakan.

# Q2. Koherensi dan Dampak Jangka Panjang

*"Masing-masing program bisa dibela. Masalahnya, mereka berebut satu dompet fiskal yang sama."*

- **Uji 1, koherensi fiskal.** Semua program menarik dari APBN yang sama; rasio pajak stagnan. MBG sekitar Rp240 T dalam RAPBN 2027, pos terbesar di bawah BGN. Ruangnya diambil dari TKD dan belanja K/L lain: substitusi, bukan sinergi.
- **Uji 2, koherensi antarprogram.** MBG bisa menjadi pasar pangan lokal, tetapi menu masih ultra-proses dan susu kemasan; Celios ingatkan risiko umpan balik harga pangan. Hilirisasi nikel dan food estate berbenturan dengan komitmen iklim; KEN 2025 menjadikan gas pilar jangka panjang (carbon lock-in).
- **Uji 3, koherensi waktu.** Dampak jangka panjang hanya bisa diklaim kalau diukur. Indikator status gizi penerima MBG (IKSS 2.3) belum ada datanya. Tanpa baseline, kita membagikan porsi, bukan membangun modal manusia 2045.
- **Syarat koherensi:** *theory of change* yang eksplisit. Program A menghasilkan X, menjadi masukan program B, diukur dengan indikator C. Itu yang belum ada.

# Q3. Kapasitas Negara, Koordinasi, dan Daerah

*"Daerah diminta menjalankan program nasional, sambil dipotong uangnya dan tidak diajak merancang."*

- **Lima dimensi kapasitas negara:** regulasi, kelembagaan, akuntabilitas, perencanaan, implementasi. Kuat di regulasi (Perpres cepat), lemah di akuntabilitas dan implementasi. Perpres 115/2025 tata kelola MBG terbit setelah 11 bulan, tanpa ganti rugi korban.
- **Koordinasi tanpa kewenangan memutuskan hanyalah harapan.** Kabinet sekitar 100 menteri dan wamen plus badan baru: garis tanggung jawab kabur. Siapa bertanggung jawab atas keracunan MBG?
- **Daerah: pelaksana yang dikeluarkan dari desain.** 298 daerah bergantung pada TKD untuk lebih dari 80% pendapatan. Pemangkasan TKD memukul puskesmas, sekolah, jalan desa: infrastruktur yang justru dibutuhkan MBG dan JKN.
- **Data sebagai fondasi.** 13,5 juta peserta PBI JKN dinonaktifkan lewat DTSEN (awal 2026), termasuk 120.000 pasien katastropik, tanpa verifikasi lokal dan notifikasi.
- **SDGs dan Indonesia Emas.** SDGs hanya tercapai jika dilokalkan. Resentralisasi berjalan berlawanan arah dengan lokalisasi SDGs.

# Q4. Lima Uji Efektivitas Program

*"Ukurannya bukan berapa juta porsi dibagikan, tetapi berapa anak yang gizinya membaik, dan tidak ada yang celaka."*

| Uji | Pertanyaan kunci | Contoh dari laporan TII |
|---|---|---|
| Aman | Apakah program mencelakakan penerimanya? | MBG: 50.059 korban keracunan, 560 kejadian, 36 provinsi (Kemenkes, 2 Sep 2026) |
| Tepat | Apakah menjangkau yang paling membutuhkan? | MBG belum berbasis risiko (stunting, 3T); penonaktifan PBI JKN salah sasaran |
| Terukur | Adakah baseline, endline, evaluasi independen? | Indikator status gizi (IKSS 2.3) BGN belum ada datanya |
| Terbuka | Data, sanksi, pengaduan dapat diakses publik? | Usulan dashboard status SPPG, kasus, dan sanksi |
| Adil | Siapa menanggung risiko: kelompok rentan, perempuan, daerah? | Risiko administratif PBI JKN dipindahkan ke pasien |

# Q4. Prinsip Kelembagaan untuk Evaluasi

- **Evaluasi sebelum ekspansi.** Program diperluas hanya bila lolos uji tahap sebelumnya. BGN menangguhkan 1.276 SPPG tanpa sertifikat higiene: patut diapresiasi, tetapi harus menjadi aturan, bukan reaksi.
- **Evaluator independen dari pelaksana.** Libatkan audit kinerja BPK, evaluasi Bappenas, kampus, dan OMS. Pelaksana tidak menilai dirinya sendiri.
- **Partisipasi substantif, bukan prosedural.** Matriks tindak lanjut (masukan diterima atau ditolak, berikut alasannya) membedakan konsultasi dari sekadar legitimasi.
- **Pengaduan dan pemulihan diatur dalam regulasi,** termasuk mekanisme ganti rugi bagi korban keracunan dan peserta yang dirugikan penonaktifan.
- **Keracunan MBG adalah persoalan sistemik,** bukan kesalahan teknis beberapa dapur: pengawasan, standar, kompetensi, dan akuntabilitas.

# Q5. Pertumbuhan, Keberlanjutan, dan Kebebasan Ekonomi

*"Pertanyaannya bukan pertumbuhan versus lingkungan, tetapi siapa menikmati untungnya dan siapa menanggung asapnya."*

- **Kualitas pertumbuhan.** Angka sekitar 5% stabil, tetapi apakah menciptakan kerja formal yang layak? Pertumbuhan yang ditopang negara, BUMN, dan Danantara berisiko menyingkirkan swasta dan UMKM.
- **Kebebasan ekonomi punya dua sisi.** Kepastian hukum, hak milik, dan kualitas regulasi; sekaligus kebebasan warga untuk berpartisipasi, yang butuh gizi, kesehatan, pendidikan, dan daerah dengan ruang fiskal. Negara tidak harus kecil, tetapi tidak boleh menguasai sendirian.
- **Biaya lingkungan sudah nyata.** Karhutla Januari–Juli 2026: 202.004 ha, naik 69% dari 2025. Asap melumpuhkan sekolah dan ekonomi hingga Singapura dan Malaysia.
- **Tantangan terbesar: ekonomi-politik.** Koalisi kepentingan ekstraktif (nikel, batu bara, sawit) dan konflik kepentingan dalam pelaksanaan program. Gagasan dikalahkan kepentingan.
- **Ruang sipil adalah prasyarat.** Pengaduan hak rasa aman ke Komnas HAM naik 27%; pelanggaran kebebasan berekspresi (SAFEnet) 170 menjadi 315. Label "antek asing" mematikan sistem peringatan dini negara.

# Penutup: Tiga Indikator hingga 2027

*"Negara yang kuat bukan negara yang besar, melainkan negara yang mampu mendengar dan mau mengoreksi diri."*

- **Gizi terukur.** Apakah MBG mempublikasikan data status gizi (baseline dan endline) sebelum anggaran 2027 dieksekusi penuh?
- **Daerah dipulihkan.** Apakah TKD 2027 dipulihkan dengan formula transisi yang jelas?
- **Akuntabilitas aparat.** Apakah ada satu saja kasus kekerasan aparat atau serangan terhadap pembela HAM yang diusut tuntas di peradilan umum?
- **Ukuran tiga tahun ke depan:** berani mengevaluasi sebelum memperluas, mengembalikan ruang bagi daerah, dan menjawab kritik dengan data, bukan label.

# Terima kasih

**Yanuar Nugroho**
Sekretaris Jenderal Konferensi Republik – Perhimpunan Indonesia Merdeka
Pendiri dan Penasihat NALAR Institute
Jakarta, 22 Oktober 2026

# Sumber Utama

Oceanto, A.F., Primaresti, F., Pratiwi, M.N.R.D., dan Adijaya, P.R. (2026). Laporan Sintesis Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran. Jakarta: The Indonesian Institute.

The Indonesian Institute (2026). Undangan dan ToR The Indonesian Forum Seri ke-137, 9 Oktober 2026.

Infobank (2 Okt 2025). Transfer ke Daerah Turun Jadi Rp693 T di 2026.

Katadata (21 Agu 2026). Purbaya Tegaskan Anggaran MBG 2027 Rp240 Triliun; iNews/RCTI+ (6 Jul 2026). Banggar: MBG 2027 Rp174 Triliun.

Kabarbursa (2026). Celios Peringatkan Risiko Feedback Loop Harga Pangan dari Belanja MBG 2027.

Investortrust (Agu 2026). BPS: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2026 Tercatat 5,29%.

OECD DAC (2019). Better Criteria for Better Evaluation. Paris: OECD.

Chen, C. dkk. (2015). ND-GAIN Country Index Technical Report; IPCC (2014). 2013 Wetlands Supplement.